

# **SKRIPSI**



## **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH ARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MAROS**

**OLEH:  
PUTRI WIJAYANTI  
B 111 11 285**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH ARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MAROS**

**OLEH:**

**PUTRI WIJAYANTI**

**B 111 11 285**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MAROS**

Disusun dan diajukan oleh:

**PUTRI WIJAYANTI**

**B111 11 285**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 30 Januari 2015  
dan Dinyatakan Lulus


**Panitia Ujian**

**Ketua**



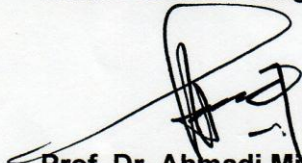
**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
**NIP. 1963 1024 1989 031 002**

**Sekretaris**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 1966 0827 1992 032 002**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

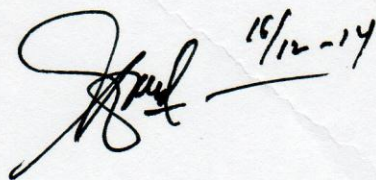
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : PUTRI WIJAYANTI  
Nomor Induk : B 111 11 285  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul : PEMENUHAN HAK MENDPATKAN UPAH ATAU  
PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS IIA MAROS.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

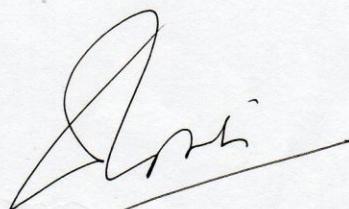
Makassar, November 2014

Pembimbing I,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II,



Dr. Dara Indrawati S.H., M.H.  
NIP. 19660827 199203 2002



## PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **PUTRI WIJAYANTI**

No. Pokok : B111 11 285

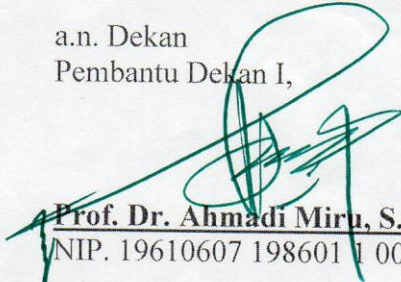
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRAK**

Putri Wijayanti (B111 11 285) “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros”. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I, dan Dara Indrawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga emasyarakatan Kelas IIA Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros.

Penelitian dilaksanakan di Maros, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros telah diupayakan sebaik mungkin dan narapidana yang bekerjapun telah merasa cukup dengan upah yang mereka terima sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomer: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Bentuk pekerjaan yang dilakukan seperti pertukangan, perbengkelan, perkebunan, peternakan, dan handy craft (kerajinan tangan). Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros yaitu meliputi sistem pemasaran terkait tidak adanya pihak yang bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros yang menyebabkan barang hasil produksi narapidana tidak cepat terjual sehingga pemberian upah menjadi terhambat, faktor internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kerja narapidana seperti alat pertukangan, alat perbengkelan, alat berkebun dan alat peternakan yang kurang, kurangnya instruktur yang tersedia untuk melatih narapidana, dan kurangnya anggaran untuk pembinaan kegiatan kerja narapidana. Dan faktor penghambat yang terakhir adalah faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap hasil produksi kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan dan manusia suci Nabi Muhammad Saw beserta keluarga yang disucikan Allah SWT yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta mengubah jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, serta kepada seluruh sahabat-sahabatNya yang telah menemani beliau, baik dalam suasana gembira, maupun dalam kesulitan.

Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua Penulis **Ayahanda Mardi BFL** yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta segala pengertian yang mereka berikan dalam proses penyusunan skripsi ini, kepada **Ibunda Wiji Suanti** yang telah menjadi teman cerita, teman jalan, dan menjadi teman berbagi suka dan duka. Kepada Saudara-saudara Penulis **Elita Wijayanti** dan **Elisa Wijayanti** yang walaupun kadang

menjengkelkan tapi senantiasa membantu Penulis saat mengalami kesulitan serta bersedia menjadi teman berbagi suka dan duka.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi Penulis.
4. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis.
5. Penasehat Akademik Penulis Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H.,M.H. atas arahan dan petunjuknya kepada Penulis.
6. Kepala Lapas Klas IIA Maros yang telah memberikan izin, bantuan, dan kemudahan kepada Penulis dalam penelitian.
7. Indra Risandy, S.H., yang telah membantu membimbing penulis mulai dari awal hingga sampai skripsi ini dapat selesai.



8. Teman dekat penulis yang juga para calon sarjana hukum, Ayu Alifiandri Zainal, Andi Nita Ramadhani, dan Reny Ashari, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Kepada bie, Alifiah taswin, Mierdha amier, Farahnaz Mulya Putri Utina, Karin Novrianthy, Penti Nur, Gabriella, Dyah Auliah, dan Andi putri, yang semuanya cSH, teman seperjuangan, terimakasih untuk semuanya.
10. Teman sedari dulu, Sitti Nur Aisyah, Isriani Usla S.kg, Wahyuni, Sri Rezki Yuniarti S.Ked, Nurfadillah Darwis, dan Marwah Pratiwi.
11. Keluarga besar MEDIASI 2011, dan HLSC.
12. Teman KKN Gelombang 87 Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

Dan akhirnya Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>8</b>
A. Pengertian Narapidana.....	8
B. Hak-Hak Narapidana .....	10
C. Hak Mendapatkan Upah Atau Premi .....	21
D. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan.....	24
1. Lembaga Pemasyarakatan .....	24
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan.....	26
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>32</b>
A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis dan Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Analisis Data .....	33

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana di LAPAS Klas IIA Maros .....	38
C. Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana di LAPAS Klas IIA Maros.....	45
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, seperti yang tercantum dalam Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitupun yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari tujuan tersebut adalah bahwa Negara melindungi segenap bangsa seluruhnya. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas warga negara. Warga negara dalam suatu Negara mempunyai kelompok-

kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah Negara yang sangat melindungi warga negaranya. Di Indonesia ada yang disebut dengan Narapidana. Narapidana merupakan bagian dari warga masyarakat yang untuk sementara kehidupannya terbelenggu, terasing dari masyarakat umum sebagai wujud pertanggungjawaban (sanksi) atas perbuatan pelanggaran norma-norma hukum yang telah dilakukannya.

Sebagai rangkaian pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana penjara, maka pada tahun 1964 istilah kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Melalui sistem pemasyarakatan ini, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang lebih baik dan berguna.

Mengingat kondisi narapidana yang rentan mendapat tindakan kekerasan selama menjalani masa hukumannya, maka sebagai manusia yang juga diakui eksistensinya oleh hukum, patut kiranya dibahas mengenai apa sajakah yang menjadi hak narapidana.

Narapidana sebagai manusia dan warga Negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya meskipun ada sebagian hak-haknya yang untuk sementara waktu dirampas oleh negara. Namun, pada umumnya ada hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh Negara sekalipun dan dalam keadaan apapun, hak tersebut tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang mempunyai tujuan agar warga binaan atau narapidana dapat menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya dan kemudian dapat diterima kembali di masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-



prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan agar menjadi warga binaan yang berguna bila kembali ke dalam masyarakat kelak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini ialah bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12/1995), menyebutkan :

“Warga binaan mempunyai hak-hak seperti hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, **hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan**, hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, hak mendapat pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapat kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, hak mendapat cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana, maka dibuatlah beberapa Peraturan mengenai Upah atau Premi bagi narapidana, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) merumuskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 huruf (g) yang menyebutkan bahwa Narapidana berhak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 mengatur besaran upah yang diterima narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa peraturan perundang-undangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada Narapidana khususnya hak-hak Narapidana untuk mendapatkan upah di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan judul **“Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang menjadi penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros.



## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

- a. Lembaga pendidikan yang mempelajari Ilmu Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum, khususnya bagi Hukum Pidana.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan narapidana sebagai wujud terlaksananya Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Narapidana**

Nara berarti orang, sedangkan Pidana berarti hukuman. Jadi, Narapidana adalah orang yang sedang dihukum. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Artinya bahwa narapidana harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, atau dengan kata lain narapidana tetap memiliki hak-hak yang lain seperti manusia atau warga Negara biasa.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan yang untuk sementara waktu sebagian kemerdekaannya hilang.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichten reglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevegenis Straf*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel; dan
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Proses pemidanaan menjadi penentu seseorang dapat dinyatakan sebagai narapidana atau tahanan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 butir 32, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konsep pemasyarakatan baru, Narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas atau diperlakukan tidak manusiawi. Karena bagaimanapun juga, Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif dan untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi Narapidana.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984: 26) :

Wargabinaan adalah terpidana yakni seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan hilang

kemerdekaannya. Kesalahan masa lalu Narapidana seharusnya tidak menjadikan masyarakat sekitar memberi cap (stigma) jahat kepada dirinya, karena itu narapidana tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat lainnya dan tidak merasa malu dalam pergaulan ketika nantinya telah menjalani masa pidana.

## **B. Hak-Hak Narapidana**

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, Hak adalah (1) yang benar, (2) milik; kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, (6) derajat atau martabat, dan (7) wewenang menurut hukum. Menurut buku Etika (K.Bertens, 1997), Hak bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Jadi, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah.

Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang

mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap manusia mempunyai hak yaitu :

1. Hak untuk hidup (Pasal 9).
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10).
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11).
4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17).
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20).
6. Hak atas rasa aman (Pasal 28).
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36).
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43).
9. Hak wanita (Pasal 45).
10. Hak anak (Pasal 52).

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

**1. Hak untuk hidup (Pasal 9).**

Yaitu bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10).**

Yaitu bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Kehendak yang bebas dalam arti bahwa kehendak yang lazim dari niat suci tanpa paksaan dan tekanan apapun dari siapapun terhadap keduanya.

## **3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11).**

Yaitu bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

## **4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17).**

Yaitu bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

## **5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20).**

Yaitu bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal diwilayah Republik Indonesia.

#### **6. Hak atas rasa aman (Pasal 28).**

Yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

#### **7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36).**

Yaitu bahwa setiap orang berhak memiliki milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

#### **8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43).**

Yaitu bahwa setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

#### **9. Hak wanita (Pasal 45).**

Yaitu bahwa seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.



## **10. Hak anak (Pasal 52).**

Yaitu bahwa setiap anak berhak atas perlindungan atas orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara serta memperoleh pendidikan serta pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Hak merupakan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya hak atas rasa aman dan hak mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Narapidana seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, Namun pada saat ini narapidana diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Hak Narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan seperti orang yang diasingkan, melainkan setiap narapidana harus pula dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana

memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan Narapidana.

Narapidana adalah tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Meningkatkan keselamatan narapidana berarti membuktikan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan telah menghargai hak asasi manusia. Namun sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran hak asasi, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan narapidana karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian.

Petugas lembaga pemasyarakatan harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Narapidana juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para narapidana dan petugas lain. Tidak hanya itu, manajemen lembaga pemasyarakatan juga harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan para petugas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak narapidana menjadi hal yang paling utama dan mendasar, hal ini dikarenakan inti dari perlindungan hak-hak narapidana adalah pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia agar Negara yang dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas seluruh hak-hak asasi dari warga Negara yang terpidana.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 UU No. 12/1995, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
  - a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
  - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti.
  - b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur perlengkapan mandi.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, maka berhak memperoleh STTB dari instansi yang berwenang.
  - b. Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang dikelola oleh lembaga pemasyarakatan dan di tempat kerja milik instansi pemerintah lainnya.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
  - b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.

- c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
  - d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
  - e. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.
5. Menyampaikan keluhan.
- Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substantive, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per

tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya.
- b. Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari narapidana.
- c. Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Pasal 2 menyatakan :

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32/ 1999). Pengaturan hak asasi narapidana ini juga harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhan HAM, secara otomatis juga terus dikembangkan.

Yurisprudensi internasional juga mendorong sekaligus juga memberi batasan yurisprudensi nasional agar tidak menyimpang jauh dari prinsip hukum umum yang berlaku.

Hak untuk mengembangkan diri sebagai narapidana di dalam LAPAS juga termasuk salah satu hak bagi narapidana. Sehubungan dengan itu, Sri Widayati Wiratmo Soekito (1983: 135) menegaskan :

Hak asasi tidak tanpa batas, karena jika akan dilanggar hak-hak yang sama dengan orang lain karena itu kewajiban negara adalah memberikan batas-batas sampai seberapa jauh hak-hak asasi kemerdekaan dapat dijalankan dan dilindungi pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum.

Mulyana W. Kusumah (1981: 51) menyatakan bahwa :

Bagi Indonesia semua (Hak-hak Asasi Manusia) menuju pada penciptaan kondisi-kondisi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, melalui jalan yang selaras dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena proses kemerdekaan adalah pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri.

Adi Sujatno (2000: 13) menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan ada sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membua mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat daripada sebleum dijatuhi pidana.



5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

### **C. Hak Mendapatkan Upah atau Premi**

Upah menurut Hardjan Rusli (2004 : 115) adalah :

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Berdasarkan uraian diatas, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Upah merupakan penggantian jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain atau pengusaha.

Peraturan tentang upah atau premi Narapidana meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) merumuskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya pengaturan tentang tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan.
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 huruf (g) yang menyebutkan bahwa Narapidana berhak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam pasal 5

mengatur besaran upah yang diterima Narapidana seperti 50% sebagai insentif karya Narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan Narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Upaya melindungi hak-hak narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan diikuti dengan memberikan pekerjaan bagi narapidana. Hal ini berguna untuk memotivasi agar narapidana mempunyai rencana selepas menjalani masa hukumannya. Upaya yang dilakukan ialah dengan cara memberikan pekerjaan tertentu seperti dibengkel kerja, lahan perkebunan maupun dalam membuat berbagai macam kerajinan.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengatakan bahwa narapidana berhak atas pekerjaan, dan untuk itu diberikan upah atau premi. Dengan memberikan pekerjaan, narapidana diharapkan menjadi peserta aktif dan produktif dalam pembangunan, baik selama menjalani masa pidananya maupun setelah kembali ke masyarakat, dengan kata lain lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga produktif (Hasanuddin, 1992: 1-2).

Sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana, agar bila keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana (Harsono, 1995:22).

## **D. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan**

### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*) (M. Marwan, 2009 : 405), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Di dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas dan fungsi pemasyarakatan, yaitu :

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman.
- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut : melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Romli Atmasasmita (1982:44), Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain :

- a. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
- b. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu :

“Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP.”

Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi:

“Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.”

Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Saat ini, seiring dengan era reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegakkan, baik itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), praktisi hukum, bahkan sampai pada

masyarakat umum dengan penerapan program bernama keluarga sadar hukum (kadarkum).

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi lembaga pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementrian Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyakatan hendaknya mempercepat proses resosialisasi warga binaan.

## **2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan**

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam UU No. 12/1995. Dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Sementara dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum UU No. 12/1995 yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Dalam sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para warga binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat.

Tujuan dari diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang



Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi :

1. Menjadi manusia seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa : Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum

yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Dengan demikian maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh Sahardjo (Koesnan, 1961:8) yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;  
dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dijelaskan bahwa :

- a. Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan permasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan permasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan permasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan permasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan permasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan berkesempatan berkumpul bersama keluarga dan sahabat seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Maros, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. Dengan pertimbangan bahwa dari lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan proposal ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui teknik sebagai berikut :

1. Data Primer diperoleh dengan teknik wawancara langsung terhadap narasumber berkaitan dengan permasalahan, seperti pegawai LAPAS dan narapidana.
2. Data Sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat dari pakar yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

#### **D. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Maros Sulawesi Selatan atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros dibangun pada Tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dan ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km.3 Mandai Kabupaten Maros. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros mempunyai kapasitas 202 Orang. Berdiri di atas lahan kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m<sup>2</sup>. Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros sebanyak 70 (Tujuh



puluh) orang, 63 (Enam puluh tiga) orang diantaranya terdiri dari pegawai laki-laki dan 7 (Tujuh) orang merupakan pegawai perempuan dengan rincian :

1. Pejabat Struktural : 14 Orang.
2. Satuan Pengamanan : 35 Orang.
3. Pembina PAS : 12 Orang.
4. Dukungan Teknis : 7 Orang.
5. Tenaga Medis : 2 Orang.

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diselenggarakan Sistem Penjagaan selama 24 (Dua puluh empat) jam secara bergilir, dengan memberdayakan 4 (Empat) regu penjagaan yang terbagi dalam tugas jaga :

1. Jaga Pagi dari pukul 07.00 s/d 13.00 WITA.
2. Jaga Siang dari pukul 13.00 s/d 19.00 WITA.
3. Jaga Malam dari pukul 19.00 s/d 07.00 WITA.

**Tabel 1.**  
**Data Tentang Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros Per 3 November 2014.**

NO	TAHANAN DAN NARAPIDANA	JUMLAH
1	Tahanan Dewasa Laki-Laki	25
2	Tahanan Dewasa Perempuan	3
3	Tahanan Anak Laki-Laki	3
4	Tahanan Anak Perempuan	0
5	Narapidana Dewasa Laki-Laki	137
6	Narapidana Dewasa Perempuan	10
7	Narapidana Anak Laki-Laki	2
8	Narapidana Anak Perempuan	0
TOTAL		149
KAPASITAS		202
%		89%

*Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros per 3 November 2014, data diolah.*

Kegiatan pelayanan dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu Warga Binaan dan masyarakat. Setiap kegiatan yang akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan disesuaikan menurut tahap pembinaannya. Tahap pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan setiap warga binaan didampingi oleh wali yang telah ditunjuk. Adapun TPP tersebut dijelaskan sebagai berikut :

**1. TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) LAPAS Maros.**

TPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Tim ini beranggotakan 7 (Tujuh) Orang, terdiri dari 1 (Satu) Orang ketua, 1 (Satu) Orang Sekertaris dan 5 (Lima) Orang anggota. Semua kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan di musyawarahkan dan dievaluasi oleh TPP dalam sidang yang dilaksanakan 2 (dua) kali setiap bulan, sehingga maju mundurnya pelaksanaan bimbingan dan pelayanan tahanan sangat ditentukan oleh peran TPP.

**2. Program Perawatan dan Jenis Kegiatan.**

Dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu diadakan penentuan program yang diajukan dalam sidang TPP. Dari hasil keputusan TPP yang telah diambil melalui musyawarah dalam sidang selanjutnya diserahkan rekomendasi dan risalah sidang TPP kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dipelajari dan disetujui bila telah dipertimbangkan

bahwa program kegiatan yang telah diputuskan tersebut dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala LAPAS. Dengan demikian tugas TPP adalah member saran dan pertimbangan kepada Kepala LAPAS mengenai bentuk dan program kegiatan misalnya perawatan, pendidikan, dan bimbingan.

Usaha perawatan merupakan usaha pemenuhan pelaksanaan perawatan berupa kesehatan dengan penyediaan poliklinik, obat-obatan serta perlengkapannya dan untuk menunjang program perawatan ini di LAPAS Klas IIA Maros terdapat tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang dokter umum dan 1 (satu) orang perawat. Program perawatan tahanan dimaksudkan untuk memberikan kesiapan mental psikologis serta membimbing mereka dalam menghadapi proses perkara pidana yang sementara disangkakan kepada mereka.

Pendidikan dan bimbingan adalah dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Pembinaan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Maros diantaranya kegiatan penyuluhan agama dan pengajian.

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Maros diantaranya :

1. Peternakan sapi;
2. Perbengkelan dan pengelasan;
3. Pertukangan kayu seperti pembuatan kursi dan lemari;
4. Perkebunan seperti jagung, kacang tanah dan sayur-sayuran;
5. *Handy craft* (Kerajinan Tangan).

Selain dari kegiatan tersebut diantara mereka pun ada yang diberi aktivitas khusus seperti pada kegiatan di unit pertokoan koperasi LAPAS Klas IIA Maros dengan maksud agar dapat mengembalikan rasa percaya diri mereka sebagai warga yang bertanggung jawab serta dapat bersosialisasi dengan baik.

#### **B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros.**

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus diberikan hukuman. Adapun hukuman yang diberikan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan pada suatu lembaga pemasyarakatan dalam kerangka pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dalam institusi-institusi lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 UU No.12 Tahun 1995).

Sistem kepenjaraan yang telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan menjadikan narapidana yang sedang menjalani pidana di LAPAS disibukkan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros adalah mengikuti pelatihan kerja yang terdiri dari berbagai jenis pekerjaan.

Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Maros, maka penulis melakukan penelitian secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Maros tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narapidana dan pegawai LAPAS klas IIA Maros.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros, salah satunya ialah Bapak Muhammad Sultan Agung, Beliau mengemukakan bahwa :

Pada saat saya pertama kali ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros ini, pihak LAPAS sudah memberitahukan hak-hak saya selama disini seperti hak untuk diberi binaan, hak pelayanan kesehatan, makanan yang layak, ibadah dan yang lain.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa narapidana telah mengetahui hak-hak yang harus diterima sebelum menjalani hukumannya melalui penjelasan oleh pembimbing pemasyarakatan pada awal menjalani pembedaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros, penulis memperoleh data terkait jenis-jenis pelatihan kerja yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut, yakni sebagai berikut :

### **1. Pertukangan**

Pertukangan merupakan salah satu pelatihan kerja unggulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. Tujuan pelatihan kerja pertukangan ini adalah untuk memberikan bekal keterampilan kepada narapidana sehingga nantinya setelah selesai menjalani pemidanaan dapat dikembangkan sebagai wirausaha.

Menurut hasil wawancara tanggal 3 November 2014 dengan H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, kegiatan pertukangan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros dilaksanakan setiap hari mulai pagi sampai sore hari yang dilakukan di dalam Lapas. Kegiatan pertukangan ini meliputi pembuatan kursi, meja dan lemari yang berbahan dasar kayu. Kegiatan pertukangan ini dipimpin oleh seorang instruktur ahli yang mengajarkan narapidana. Nantinya narapidana yang sudah pandai dalam kegiatan pertukangan ini akan ikut serta membantu instruktur untuk mengajar narapidana lain yang belum pandai. Kursi, meja atau lemari yang dikerjakan oleh narapidana biasanya adalah barang yang memang telah dipesan oleh konsumen, mulai dari bentuk maupun dari bahan kayunya. Namun tidak jarang pula narapidana membuat kursi, meja dan lemari hanya untuk persediaan yang nantinya

dapat pula dipamerkan di hari-hari besar seperti hari pemasyarakatan yang jatuh pada setiap tanggal 27 April.

Beliau menambahkan bahwa upah atas pekerjaan yang dilakukan narapidana dalam membuat kursi ataupun lemari akan diterima setelah kursi atau lemari tersebut laku terjual.

## **2. Perbengkelan**

Perbengkelan adalah pengetahuan dan keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, membentuk, mengubah bentuk, merakit, ataupun memperbaiki suatu benda menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun estetika.

Menurut hasil wawancara tanggal 3 November 2014 dengan H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, kegiatan perbengkelan ini dilakukan setiap hari mulai pagi hingga sore hari. Kegiatan perbengkelan ini juga awalnya dipimpin oleh seorang instruktur dan dilakukan dalam Lapas. kegiatan perbengkelan dalam Lapas Klas IIA Maros meliputi servis motor dan pengelasan.

## **3. Perkebunan**

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Menurut hasil wawancara tanggal 3 November 2014 dengan H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, kegiatan perkebunan dilakukan pada sebuah lahan di dalam lingkungan Lapas Klas IIA Maros.

Jenis tanaman yang ditanam antara lain jagung, kacang tanah dan sayur-sayuran. Hasil kebun ini nantinya akan dijual di Pasar Batangase yang berada dekat dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros.

#### **4. Peternakan**

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dll.

Menurut hasil wawancara tanggal 3 November 2014 dengan H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, kegiatan peternakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros tergolong dalam peternakan hewan besar karena hanya sapi yang ditanakkan. Kegiatan ini dilakukan diluar Lapas tepatnya berada dibelakang lapas. Beliau mengatakan bahwa hanya narapidana tertentu yang dapat menangani kegiatan ini dikarenakan karena lokasi peternakan yang berada di luar lapas sehingga hanya beberapa narapidana tertentu yang dipercaya menjaga dan mengelola peternakan tersebut.



## **5. Handy craft (Kerajinan tangan).**

Kerajinan tangan adalah suatu karya dimana seseorang membuat karya tersebut menjadi sebuah bernilai terutama bernilai ekonomis. Kerajinan tangan tentunya adalah sebuah karya yang diciptakan menjadi sebuah benda yang berharga yang sebelumnya tidak bernilai apa-apa.

Menurut hasil wawancara tanggal 3 November 2014 dengan H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, kegiatan kerajinan tangan yang dilakukan narapidana terdiri dari pembuatan keset kaki, dan asbak rokok. Hasil dari kerajinan tersebut akan dipamerkan dan dijual di ruang kunjungan dan pada setiap acara yang dilaksanakan pihak Lapas seperti tanggal 17 Agustus maupun setiap hari Pemasyarakatan.

Adapun pola pembagian upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros adalah hasil penjualan dikurangi modal kemudian dibagi 50%. sehingga narapidana mendapat 50% dari keuntungan penjualan barang tersebut.

Menurut Bapak Manggasali Bin Saraila selaku narapidana di LAPAS Maros, beliau mengemukakan bahwa :

Kalau menurut saya pribadi, upah yang saya terima sudah lebih dari cukup. Ibaratnya, walaupun upah yang saya terima mencukupi, saya tetap senang karena saya jadi punya keahlian dalam pertukangan disini sehingga selama saya di dalam LAPAS tidak ada waktu yang terbuang percuma karena diisi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Upah yang saya terima digunakan untuk belanja dikoperasi LAPAS, sisanya ditabung sebagai modal kalau sudah keluar nanti.

Menurut Bapak H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, tidak semua jenis pekerjaan sebagaimana yang di telah tulis diatas mendapatkan upah atau premi, karna terkadang ada pekerjaan yang

dilakukan hanya sekedar pelatihan. Lamanya pelatihan tergantung pada tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan.

**Tabel 2.**  
**Data Pekerjaan Pertukangan oleh Narapidana di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Klas IIA Maros**

No	Tanggal Pengerjaan	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan Barang	Jumlah Pekerja	Jumlah Upah/Premi
1	3 September 2014 - 24 September 2014	Lemari	2	Rp. 1.750.000	5	Rp. 437.500
				Rp. 1.500.000		Rp. 375.000
2	15 September 2014 - 29 September 2014	Kursi	4	Rp. 200.000	2	Rp. 50.000
3	1 Oktober 2014 - 15 Oktober 2014	Meja	2	Rp. 350.000	3	Rp. 87.500
				Rp. 300.000		Rp. 75.000

*Sumber data : Lapas Klas IIA Maros.*

Data di atas adalah salah satu jenis pekerjaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. Pekerjaan dalam bidang pertukangan dilakukan oleh beberapa orang. Besaran upah atau premi setiap orang berbeda, tergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan. Jumlah upah atau premi sebagaimana yang tertulis diatas telah di bagi sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990.

Berdasarkan data yang didapatkan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros telah diupayakan sebaik mungkin oleh pihak-pihak terkait dalam Lapas sesuai yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun masih terdapat berbagai kendala-kendala yang akan dijabarkan dalam sub bab berikutnya.

**C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros dengan melakukan wawancara dengan H.Ambo Asse,S.Pd. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak mendapatkan upah atau premi bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros adalah :

**1. Sistem pemasaran.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Ambo Asse,S.Pd selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja dapat diketahui bahwa faktor utama penghambat terpenuhinya pemenuhan hak mendapatkan upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah pemasaran. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2013 ada pihak yang bekerjasama dengan pihak lapas dalam penjualan hasil kegiatan pertukangan yaitu kursi maupun lemari. namun sejak tahun 2014 kerjasama tersebut telah berakhir dan sampai saat ini belum ada lagi pihak yang bersedia bekerjasama dengan pihak LAPAS.

Hal inilah yang membuat terlambatnya upah yang diterima narapidana ketika selesai membuat kursi ataupun lemari.

## **2. Faktor internal**

Secara internal, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros di dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi bagi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kerja narapidana seperti alat pertukangan, alat perbengkelan, alat berkebun dan alat peternakan yang kurang;
- b. Kurangnya instruktur yang tersedia untuk melatih narapidana; dan;
- c. Kurangnya anggaran untuk pembinaan kegiatan kerja narapidana.

## **3. Faktor Eksternal**

Kendala-kendala secara eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi bagi narapidana, diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap hasil produksi kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang meliputi sistem pemasaran, faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. Hal ini

menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap hasil produksi kegiatan kerja narapidana. Selain itu, dapat pula dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas barang produksi hasil kegiatan kerja narapidana sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat atau pihak-pihak tertentu untuk membeli hasil produksi tersebut. Sehingga narapidana yang telah memproduksi barang tersebut dapat segera mendapatkan upah sesuai peraturan yang tercantum dalam pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang dana penunjang pembinaan narapidana dan insentif karya narapidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros telah diupayakan sebaik mungkin dan narapidana yang bekerjapun telah merasa cukup dengan upah yang mereka terima.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros meliputi sistem pemasaran terkait tidak adanya pihak yang bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros yang menyebabkan barang hasil produksi narapidana tidak cepat terjual sehingga pemberian upah menjadi terhambat. Selanjutnya faktor internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kerja narapidana seperti alat pertukangan, alat perbengkelan, alat berkebun dan alat peternakan yang kurang, kurangnya instruktur yang tersedia untuk melatih narapidana, dan kurangnya anggaran untuk pembinaan kegiatan kerja narapidana. Dan faktor penghambat

yang terakhir adalah faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap hasil produksi kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros.

**B. Saran.**

Berdasarkan data yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu mengupayakan kerjasama dengan pihak luar LAPAS agar barang hasil produksi kegiatan kerja narapidana cepat dapat terjual sehingga upah narapidana dapat terpenuhi.
2. Agar kiranya disediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kualitas hasil produksi narapidana.
3. Perlunya penyediaan instruktur ahli dan peningkatan kualitas pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan kerja narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Direktorat Jenderal Permayarakatan, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Hardjan Rusli. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia, Jakarta  
G. Kartasapoetra, RG. Kartasapoetra,et all, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Binakasa, Jakarta.

Harsono, Hs, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Jembatan, 1995.

K. Bertens. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koesnan, R.A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung, Sumur Bandung.

Mulyana W. Kusumah. 1981. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Halia Indonesia.

M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.

Romli, Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung. Alumnii.

Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*. Jakarta: Armico.

Sri Widayati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01- PP. 02. 01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01- PR. 07. 03. Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas.

Peraturan Penjara (*Gestichtenreglement, Staatblad* 1971 No. 708)

### **Situs**

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18371/1/equ-agu2007-12%20\(7\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18371/1/equ-agu2007-12%20(7).pdf) diakses tanggal 25 September 2014 pukul 07.34  
WITA



# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu  
Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
**MAKASSAR 90222**

Makassar, 27 Oktober 2014

Kepada

Nomor : 14400/P2T-BKPM/19.36P/10/VII/2014

Lampiran :-

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan  
HAM Prov. Sulsel

di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 7320/UN4.6.3/PL.02/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Putri Wijayanti  
Nomor Pokok : B111 11 285  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**“PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MAROS”**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Oktober s/d 27 November 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
Pit. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



H. IRMAWATI YASIN LIMPO, SH.  
★ Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d  
NPK P M : 19670824 199403 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal







Nomor : W.23.UM.01.01- 196  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

27 Oktober 2014

✓ Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros  
di - Maros

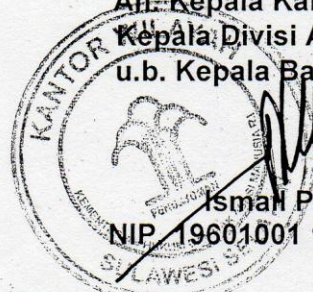
Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14400/P2T-BKPM/19.36P/10/VII/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Putri Wijayanti  
Nomor Pokok : B111 11 285  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jln. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar

bermaksud untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, untuk menyusun **Skripsi** dengan judul “ **PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAROS** ” yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Oktober 2014 s/d 27 November 2014, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi  
u.b. Kepala Bagian Umum,



Ismail Pabitte  
NIP. 19601001 199103 1 002

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Divisi Administrasi Pada Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan di Makassar ( Sebagai Laporan )
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Pada Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan di Makassar
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Sulawesi Selatan di Makassar
6. Peringgal.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAROS**

JL.RAYA KARIANGO KM.3 MANDAI-MAROS TELP/FAX : ( 0411) 330466/4814550

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor ; W23.E8.PS.04.01-632

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN AMIN, SH, MH.  
NIP : 19630521 199303 1 001  
Pangkat / gol : Pembina Tk. I/ IVb  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasisiwi tersebut dibawah ini :

Nama : PUTRI WIJAYANTI  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok : B111 11 285

Benar telah mengadakan penelitian / pengumpulan data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros mulai Tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan selesai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“ PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI  
ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAROS“**

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Maros, 06 Desember 2014

**KEPALA,**  
  
LUKMAN AMIN, SH, MH  
NIP. 19630521 199303 1 001